

## **Melacak Implikasi Politik Pendidikan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Historis**

**Maftuh Ajmain**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>1</sup>Email: [maftuh@uinbanten.ac.id](mailto:maftuh@uinbanten.ac.id)

### **ABSTRACT**

This essay aims to put light on the effects of Dutch colonial education politics on Islamic education. This research finds numerous implications for the existence of Islamic education in Indonesia using a historical point of view. Both positive as well as negative aspects might be used to analyze these implications. The movement to modernize Islamic education is one of its beneficial elements. While the growth of dualism in Indonesia's national education system is a disadvantage.

**Keywords:** education politics, Islamic education, educational dualism

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan implikasi dari kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini menemukan beberapa implikasi bagi keberadaan pendidikan Islam di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dilihat baik dari aspek positif maupun negatif. Di antara aspek positif yaitu lahirnya gerakan modernisasi pendidikan Islam. Sedangkan aspek negatifnya yaitu munculnya dualisme dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

**Kata Kunci:** Politik Pendidikan, Pendidikan Islam, dualisme pendidikan

## **1. PENDAHULUAN**

Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Conelis de Houtman yang tiba di Banten. Setidaknya ada tiga tujuan Belanda datang ke Indonesia. *Pertama*, tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi; *kedua*, tujuan untuk menyebarkan ideologi dan keagamaan; dan *ketiga*, tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ketiga tujuan ini sering diungkapkan dengan istilah tiga G, yaitu *Gold*, *Gospel*, dan *Glory*. Secara harfiah *Gold* artinya emas, yaitu berkaitan dengan tujuan ekonomi. *Gospel* secara harfiah berarti Injil, kitab suci atau Gereja, berkaitan dengan misi penyebaran agama Kristiani, dan *Glory* yang berarti kejayaan, berkaitan dengan penguasaan dalam bidang politik dan kekuasaan (Abuddin Nata: 2011), p. 277-278). Maksudnya adalah bahwa kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya untuk tujuan berdagang dan kemakmuran para pengusaha dan negaranya. Namun setelah mereka mendapatkan keuntungan yang berlimpah, mereka melanjutkannya dengan tujuan politik dan misionaris Kristen. Ketiga motif inilah yang akan selalu mewarnai perjalanan panjang penjajahan mereka di Indonesia hingga paruh kedua abad ke-20.

Namun kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk pemerintah Hindia Belanda adalah pada kebijakan politik pendidikannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Brugmans bahwa, politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial. Oleh karena itu, diselenggarakannya pendidikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda lebih ditekankan untuk kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya sendiri. Kalaupun pada akhirnya kolonial Belanda membuka kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar” (S. Nasution: 1987 p. 3).

## 2. TINJAUAN TIORITIS

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*policy*”. Dalam studi ilmu politik, kata tersebut selalu dirangkai dengan kata lain sehingga membentuk suatu makna lain, misalnya *policy studies* yang termasuk di dalamnya *policy research* dan *policy evaluation*. Dalam studi ilmu ekonomi, kesehatan, pertanian dan pekerjaan sosial dikenal dengan istilah “*studies policy*” (Noeng Muhajir: 1998, p. 29). Kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Supardi dan Ahmad Sanusi: 1988, p. 11). Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan adalah alternatif yang diambil atas pengkajian terhadap sesuatu masalah (Noeng Muhajir: 1998, p. 29). Jadi kebijakan selalu mengandung keputusan-keputusan, di mana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal; sedang kriteria yang dipahami mungkin rasionalitas, prioritas atau kaidah konstitusi.

Tahapan kebijakan meliputi penyusunan kebijakan (*policy formulation*), penerapan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam tulisan ini adalah difokuskan pada produk kebijakan dalam formulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan proses penyusunan kebijakannya. Kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah dimulai oleh orang-orang Portugis (Ary H. Gunawan: 1995, p. 9). Kebijakan pendidikan yang dirumuskannya sangat berhubungan erat dengan politik mereka pada umumnya.

Kata politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged*,

*prudent* (A.S. Hornby A.P. Cowic: 1996, p. 893). Dalam kamus Inggris, kata politik diterjemahkan dengan “bijaksana” atau “dengan bijaksana”.(John M. Echols dan Hassan Shadily: 1981, p. 437). Kata ini terambil dari kata Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek), *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota (Noah Webster: 1980, p. 437). Politik kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik” (W.J.S. Poerdawarminta: 1983, p. 763). Menurut Hassan Shadily, politik dilihat sebagai konsep yang berkenaan dengan soal-soal pemerintahan. Makna politik sebagai tipu muslihat atau kelicikan ternyata tak terpakai lagi (Hassan Shadily: 1983, p. 273). Dengan demikian, yang dimaksud politik dalam tulisan ini, adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau sikap, yang bertujuan memengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

Setidaknya terdapat dua ciri pokok yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang diselenggarakannya, yakni ekonomi dan penjajahan (Jalaludin: 1990, p. 10). Kaitannya dengan ekonomi, kolonial mengeluarkan kebijakannya dengan berorientasi atas keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang akan diperolehnya. Jadi bukan berdasarkan kemanusiaan dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan kaitannya dengan orientasi penjajahan, yakni pemerintah Hindia Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik rakyat agar tidak lebih daripada mampu memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu, mereka diharapkan oleh kolonial untuk dapat menaatinya, sehingga penjajahannya atas tanah Indonesia akan menjadi tetap lestari.

Dengan demikian sebagai bangsa penjajah, Belanda telah melakukan diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik secara sosial, ras, politik maupun agama. Diskriminasi ini tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi Sosial

Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan untuk kaum bangsawan dengan sekolah untuk rakyat biasa. Untuk kaum bangsawan, didirikan Sekolah Raja (*hoofdenschool*) pada tahun 1865 dan 1872 di Tondano. Sedangkan untuk rakyat pribumi biasa didirikan

Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*) atau yang sering dikenal dengan istilah Sekolah Ongko Loro.

## 2) Diskriminasi Ras

Diskriminasi ini sangat jelas terlihat pada klasifikasi sekolah di Indonesia. Sebagai contoh, sekolah dasar bagi golongan Eropa adalah ELS (*Europeesche Lager School*), sedangkan Timur Asing adalah HCS (*Hollandsche Chinese School*). Begitu pula untuk golongan pribumi. Kelas Satu atau HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) yang berbahasa pengantar bahasa Belanda diperuntukkan bagi anak-anak para bangawan, dan rakyat jelata hanya kebagian menikmati Sekolah Desa (*volkschool*).

## 3) Diskriminasi Anggaran

Anggaran pendidikan, oleh kolonial Belanda, lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa, padahal jumlah siswa di sekolah-sekolah bumiputera lebih banyak. Pada 1909 di sekolah-sekolah bumiputera terdapat 162.000 siswa, sedangkan di sekolah Eropa hanya 25.000 siswa. Tetapi ironisnya, subsidi yang dialokasikan untuk sekolah bumiputera hanya f. 1.359.000, sementara untuk sekolah Eropa dua kali lebih banyak, yakni f. 2.667.000.

## 4) Diskriminasi dalam Hal Kepemelukan Agama

Kepemelukan terhadap suatu agama tertentu juga menjadi dasar kebijakan pendidikan Belanda. Program pendidikan pemerintah dikonsentrasikan di wilayah-wilayah di mana terdapat sejumlah besar penduduk yang beragama Kristen, seperti Batak, Manado dan Kalimantan. Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama masyarakat muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali, bahkan cenderung dimusuhi. Dalam hal ini Belanda lebih memihak Kristen, kendati secara formal mereka netral terhadap agama.

Kebijakan yang diskriminatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial yang dicanangkan oleh mereka, yaitu:

- a) Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu
- b) Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan penjajah
- c) Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat
- d) Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial Belanda

- e) Dasar pendidikannya adalah Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan.

Gambaran di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Suratman, sebagaimana dikutip Jalaluddin, yang menyimpulkan bahwa program pendidikan pemerintah kolonial Belanda bersifat heterogen (banyak ragamnya) dan diskriminatif (Jalaludin: 1990, p. 11). Sedangkan S. Nasution (1987, p. 20) mengatakan secara lebih lengkap mengenai ciri-ciri kebijakan pendidikan Hindia Belanda, yaitu:

- a. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia
- b. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi
- c. Kontrol sentral yang ketat
- d. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan
- e. Prinsip konkordansi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda
- f. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan pribumi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, tulisan ini menunjukkan seberapa besar implikasi kebijakan politik pendidikan pemerintahan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam di nusantara ini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kembali data-data masa lalu mengenai kebijakan pendidikan yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, sebagai studi historis, penelitian ini menerapkan metode *dokumenter*, yakni menelaah arsip surat dan dokumen resmi, seperti Undang-undang, Surat Keputusan, dan peraturan-peraturan serta peninggalan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Diperkirakan sumber-sumber *dokumenter* yang disebutkan ini akan sulit untuk didapatkan dalam bentuknya yang asli (sumber primer). Mungkin di sinilah aspek kelemahan kajian ini. Namun agaknya kelemahan ini menjadi teratasi karena penulis merujuk kepada hasil-hasil karya yang berasal dari disertasi penulisnya, misalnya –untuk menyebut beberapa- oleh Husnul Aqib Suminto (1985), Maksum Mukhtar (2001),

Zamakhsari Dhofier (1982), Deliar Noer (1982), Alwi Shihab (1998) dan Karel A. Steenbrink (1994).

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran umum tentang tema yang diangkat baik data yang berkaitan langsung maupun data yang mendukungnya. *Kedua*, melakukan pemetaan dan klasifikasi terhadap data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan tema yang diangkat. *Ketiga*, menganalisis secara kritis terhadap data yang relevan tersebut untuk diangkat dalam bentuk tulisan yang runtut.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode deduktif (berpikir dari yang umum ke khusus), induktif (berpikir dari yang khusus ke umum) (Barnadib, 1982: 52-53) dan meta-analisis, yakni suatu bentuk kajian dalam analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian yang berkaitan.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, reduksi, yaitu menyeleksi data yang terkait dengan jalan mengurangi seminimal mungkin data yang tidak relevan. *Kedua*, displai, yakni menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tampilan bagan atau tabel agar dapat diketahui kecenderungannya. *Ketiga*, sistematisasi, yakni melakukan analisa secara berurutan menurut periodisasinya, dan bertahap sesuai dengan perubahan yang terjadi. *Keempat*, kategorisasi, yakni pengelompokan atas bentuk atau pola tertentu.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Kebijakan Pemerintah Belanda terhadap Pendidikan Islam**

Kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, sesungguhnya didasari oleh rasa takut mereka akan Islam. Di mata kolonial Belanda, Islam dipandang bukan saja sebagai ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (*Rust en Orde*), melainkan juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan penjajahan mereka di kepulauan Nusantara ini (Shihab, Alwi: 1998, p. 69).

Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh Islam dari rakyat jajahannya maka mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah (S. Nasution: 1987 p. 4). Gagasan Snouck Hurgronje mengenai politik asosiasinya meyakini bahwa pendidikan Barat yang diberikan kepada rakyat jajahan akan mengalahkan Islam. Karena, menurut

pandangannya, lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi akan relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh yang akan mereka miliki akan lebih mempermudah mempertemukannya dengan pemerintahan Eropa. Pendidikan Barat, dalam analisisnya, merupakan sarana yang paling meyakinkan untuk mengurangi dan akhirnya menaklukkan pengaruh Islam di Indonesia (Harry J. Benda: 1989, p. 135).

Kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda mereka tempuh karena mereka tidak ingin masyarakat pribumi menjadi pintar dan umat Islam menjadi maju. Atas kekhawatiran dan ketakutannya terhadap ancaman umat Islam suatu saat dapat meledak, maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna menghalangi kemajuan dan perkembangan agama Islam. Di antara kebijakan-kebijakan itu adalah:

- a. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden* (baca: Lembaga Peradilan Agama). Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*).
- b. Pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru kedua yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua Ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang dan penganjur agama Islam di negeri ini.
- c. Pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Liar “Sekolah Liar” (*Ordonantie Wildescholen*). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.

Pembahasan mengenai ciri kebijakan pendidikan Belanda di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya mengendalikan proses produksi, isi dan penerapan kebijakan pendidikan. Kebijakannya tampaknya bukan hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara rakyat jajahannya dengan pemerintah Belanda, melainkan atas kesewenang-wenangan Belanda sendiri.

#### 4.2 Kondisi Pendidikan Islam pada Awal Abad ke-20

Pada permulaan abad ke-20 (1900), semangat nasionalisme muncul di berbagai wilayah di Nusantara. Pergerakan-pergerakan baik melalui individu dan kelompok yang terhimpun dalam organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga mulai menggema, baik yang bercorak kebangsaan maupun keagamaan. Demikian pula tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa itu merasa bertanggung jawab untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam yang telah ada. Steenbrink menggambarkan bahwa pada awal abad ke-20 tersebut telah terjadi apa yang disebutnya sebagai kebangkitan, pembaharuan (*renaissance*) atau bahkan pencerahan (Steenbrink: 1994, p.26).

Sebelum abad ke-20, lembaga pendidikan Islam formal yang disebut madrasah belumlah dikenal di kepulauan Nusantara sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Madrasah dalam tradisi pendidikan Islam Indonesia adalah fenomena baru yang baru muncul seiring dengan menjamurnya organisasi-organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan pada awal-awal abad ke-20. Padahal dalam catatan sejarahnya, lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah ini di Timur Tengah telah dikenal setidaknya pada abad ke-11 Masehi atau abad ke-4 Hijriyah yang dipopulerkan oleh seorang wazir (perdana menteri) dinasti Saljuq, Nizham al-Mulk (w. 485/1092). Tradisi keilmuan di madrasah ini adalah ilmu-ilmu agama, dengan penekanan khusus pada bidang fiqh, tafsir dan hadis (Azra: 1999).

Sadar akan kenyataan di atas, tidak heran apabila Maksum berasumsi bahwa madrasah di Indonesia bukanlah madrasah dalam tradisi Islam pada abad ke-11 seperti di Timur Tengah tersebut. Bahkan lebih jauh ia menduga, jangankan pesantren di Indonesia merupakan nama lain madrasah tersebut. Karena, menurutnya lebih jauh, kehadiran madrasah pada awal abad ke-20 di Indonesia sangat dimungkinkan terpengaruh oleh para pembaharu di Timur Tengah masa modern (Maksum Mukhtar: 2001, p. 80).

Memang sulit untuk disangkal bahwa para pembaharu di Indonesia pada kenyataannya justeru terpengaruh oleh gagasan-gagasan pembaharuan dari Timur Tengah, terutama gagasan-gagasannya Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dalam banyak ulasan disebutkan bahwa sejumlah tokoh pembaharu di Indonesia pada awal abad ke-20 membaca secara rutin majalah *al-Manar* yang sekaligus merangsang mereka untuk melaksanakan pembaharuan melalui perkumpulan-perkumpulan di tanah air. Penyebaran pembaharuan tersebut berjalan lebih intensif lagi setelah muncul majalah berbahasa Melayu,

*al-Imam* di Singapura antara 1906-1917, dan *al-Munir* di Padang antara 1911-1916 (Abaza: 1999, p. 51).

Munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang memunculkan lembaga pendidikan Islam yang baru ini, menurut Azyumardi Azra, adalah untuk menjawab tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen (Azra: 1999, p. 99). Di mata umat Islam, pemerintah kolonial sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen. Sekolah-sekolah Kristen yang umumnya diberi subsidi oleh pemerintah kolonial, sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda suatu aliran gereja (Suminto: 1985, p. 51). Semua ini ikut merangsang para pembaharu untuk mereformasi sistem pendidikan tradisional yang ada dengan maksud untuk menjawab tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen tersebut.

Kelahiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini juga berlandaskan pada beberapa alasan berikut:

- a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
- b. Usaha penyempurnaan sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah.
- c. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau dengan Barat sebagai sistem pendidikan mereka.
- d. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi (Muhaimin dan Abdul Majid: 1993, p. 305).

Sedangkan Maksu, yang secara khusus meneliti mengenai lembaga pendidikan madrasah ini, berpendapat bahwa kelahiran madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi, yaitu: a) adanya gerakan pembaruan dalam Islam di Indonesia, dan b) adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda (Maksu Mukhtar: 2001, p. 79).

Situasi yang *pertama*, yakni adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20 tersebut, dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Steenbrink mengidentifikasi adanya empat faktor yang mendorong gerakan pembaharuan di Indonesia, antara lain: a) faktor keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis; b) faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; c) faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik; d) faktor pembaharuan

pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya Steenbrink menjelaskan bahwa kaum pembaharu dan gerakan pembaharuan ini dipengaruhi oleh salah satu dari empat faktor tadi. Ia mengaku bahwa sepanjang penelitiannya tidak ada contoh yang sempurna di Indonesia dalam arti gerakan pembaharuan yang menerima empat dorongan sekaligus (Steenbrink: 1994, p.26-28).

Bagi tokoh-tokoh pembaharu, pendidikan kiranya senantiasa dianggap sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan keislaman masyarakat. Dari pandangan seperti inilah kemudian pada gilirannya mendorong mereka untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam tradisional yang ada sehingga menghasilkan bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam baru, yaitu madrasah. Sebagaimana dikatakan oleh Maksud dengan mengambil kasus Minangkabau, Sumatera Barat: "Untuk mempertahankan pendirian masing-masing kelompok, lembaga-lembaga pendidikan dijadikan sebagai alat sosialisasi ide dan bahkan mobilisasi massa. Dalam hal ini, Kaum Muda menjadikan madrasah sebagai pusat konsolidasi ide dan mobilisasi massa, sedangkan Kaum Tua menjadikan surau sebagai pusat kepentingan yang sama." (Maksud Mukhtar: 2001, p. 85).

Situasi yang *kedua*, yaitu adanya respons terhadap politik pendidikan Hindia Belanda, adalah kenyataan akan sekolah-sekolah sekuler kolonial Belanda yang semakin merakyat dan adanya sikap diskriminatif dari pemerintah terhadap rakyat pribumi dengan membiarkan mereka terbatas untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, dan untuk menjaga mereka agar tetap tenggelam dalam kebodohan.

Dari sudut ini, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi asas ajaran Islam. Namun di pihak lain, pendidikan Islam sudah saatnya menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal kelembagaan, struktur materi, maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Tercatat dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi yang telah berjasa dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia pada beberapa dekade awal abad ke-20, di antaranya adalah Abdullah Ahmad, salah seorang lokomotif pembaharuan di Minangkabau. Menurut Mahmud Yunus, dialah yang pertama kali menerapkan sistem klasikal, dan menggunakan bangku, meja dan papan tulis di lembaganya, yaitu Sekolah Adabiyah (*Adabiyah School*) yang didirikan pada tahun 1907 (Mahmud Yunus: 1995, p. 63).

Untuk menandingi (sekolah-sekolah umum terutama HIS yang didirikan pemerintah, Adabiyah dihidupkan dengan mengadopsi secara mutlak sistem dan metode pendidikan Belanda. Bedanya hanyalah di sekolah ini diajarkan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib. Lebih jauh lagi, namanya pun pada tahun 1915 diubah menjadi *Hollandsch Maleische School* atau *Hollandsch Inlandsche School Adabiyah* (HMS atau HIS Adabiyah) (Burhanuddin Daya, 1990, p. 83). Oleh karena itu tidak heran apabila salah seorang muridnya, KH. Zarkasyi – juga pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo – berkomentar: “Abdullah Ahmad bukanlah seorang modernisator, melainkan seorang *Hollandisator*” (Steenbrink: 1994, p. 42). Sebenarnya, perubahan menjadi HIS Adabiyah ini lebih disebabkan pertimbangan politis untuk mengurangi kecurigaan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Nizar: 2005, p. 95).

Menurut Stoddard, sebagaimana dikutip Muhaimin, lembaga pendidikan HIS Adabiyah ini merupakan *starting point* adab baru dalam pembaharuan pendidikan yang memengaruhi berdirinya lembaga pendidikan Islam modern yang tidak hanya terbatas pada tingkat sekolah dasar, tetapi juga sekolah menengah pertama dan atas, sampai tingkat tinggi dengan berbagai nama (Muhaimin: 2004, p. 76).

Seorang pembaharu lainnya adalah Syekh Muhammad Thaib Umar yang mendirikan Madras School di Sungayang, Batu Sangkar Sumatera Barat, pada tahun 1910. Sekolah ini hanya terdiri dari satu kelas saja, dan bahkan pada tahun 1913 sekolah ini tutup karena kekurangan guru. Namun Mahmud Yunus menghidupkan kembali sekolah tersebut pada tahun 1918 dengan nama Diniyah School, selanjutnya tahun 1931 diubah lagi namanya dengan al-Jami'ah al-Islamiyah.

Pada tahun 1915, berdiri pula Diniyah School yang didirikan oleh Zaenuddin Labai el-Yunusi. Sekolah ini adalah kebalikan dari Sekolah Adabiyah dalam penekanannya pada mata pelajaran. Yang pertama, sebagai lembaga pendidikan agama plus umum, sedangkan yang disebut terakhir, yakni Adabiyah School, sebagai lembaga “pendidikan umum” plus agama. Sambutan masyarakat umumnya baik terhadap usaha Zaenudin Labai ini, seperti tampak pada tahun 1922, telah ada 22 sekolah dengan nama yang sama berdiri di Minangkabau (Deliar Noer: 1996, p. 62).

Diniyah Putri kemudian berdiri pula di Padang Panjang pada tahun 1923 oleh Rahmah el-Yunusiyah yang merupakan madrasah putri pertama di Indonesia, yang bertujuan untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada pelajar putri yang akan menyiapkan mereka menjadi warga yang produktif dan muslim yang baik (Whalley: 1998, p. 207).

Organisasi pendidikan Islam Sumatera Thawalib semakin mewarnai perkembangan pendidikan Islam modern di Minangkabau, ketika ia membuka madrasah pada tahun 1920 di Padang Panjang di bawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah. Semula Sumatera Thawalib merupakan surau dengan nama *Sumatera Thuwailib*, kemudian terjadi penggabungan dengan surau di Bukittinggi Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan sekaligus mengubah nama menjadi Sumatera Thawalib. Selanjutnya, berdiri pula Sumatera Thawalib di Padang Japang, Sungayang/Batu Sangkar dan Maninjau, sehingga Sumatera Thawalib terdapat di lima lokasi (Tarmi: 2001).

Perkembangan pendidikan Islam modern di Minangkabau jumlahnya semakin banyak setelah organisasi Muhammadiyah berdiri di Minangkabau pada tahun 1925. Bahkan Muhammadiyah pada akhirnya mengungguli jumlah-jumlah yang dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan di Minangkabau, seperti terlihat pada jumlah di tahun 1933 berikut ini: Muhammadiyah (122), Persatuan Muslimin Indonesia (4), Diniyah (120), Thawalib (44), Pendidikan Islam Indonesia (45) dan sekolah yang tidak berafiliasi (878) (Azra: 1999, p. 144).

Di daerah Jawa, gema pembaharuan pendidikan Islam juga tidak kalah nyaringnya dengan di Minangkabau, atau bahkan mungkin lebih gencar, karena ia merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang diasumsikan bahwa perubahan akan lebih cepat terjadi di daerah ini. Hal ini terbukti dengan berdirinya organisasi al-Jami'at al-Khairiyah – lebih dikenal dengan Jami'at Khair – yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1905, di Jakarta, yang memulai organisasi dengan bentuk modern dan mendirikan sekolah dengan cara-cara modern (sistem klasikal, kurikulum, bangku-bangku dan papan tulis).

Tampilnya Jami'at Khair dalam gerakan pendidikan Islam ini terasa penting karena organisasi ini termasuk modern dalam masyarakat waktu itu. Komodernan organisasi ini terlihat dalam anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat, dan juga mengadakan rapat-rapat. Organisasi ini juga merupakan organisasi yang pertama yang didirikan oleh orang bukan Belanda yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan sistem Barat. Dengan demikian, organisasi ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

Perpecahan di tubuh Jami'at Khair melahirkan organisasi baru yaitu al-Irsyad – lengkapnya *Jami'ah al-Islam wa al-Irsyad al-Arabiyah* – yang menjuruskan perhatiannya pada bidang pendidikan. Al-Irsyad didirikan pada tahun 1913 dan baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah pada tanggal 11 Agustus 1915.

Pada tahun 1913 al-Irsyad mendirikan sebuah perguruan modern di Jakarta, dengan sistem kelas, dan materi pelajarannya adalah pelajaran umum dan pelajaran agama. Di samping itu juga, ia mendirikan sekolah guru dan kursus yang bersifat khusus. Semua sekolah ini memiliki kurikulum yang tidak berbeda dengan kurikulum sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah, namun ada tambahan pelajaran bahasa Arab (Djumhur, I. dan Danasuparta: 1976).

Kemudian, al-Irsyad juga melakukan pemberian beasiswa pada tahun 1930-an kepada beberapa lulusannya untuk belajar di luar negeri terutama di Mesir. Meskipun mereka pada akhirnya tidak banyak memberikan kontribusi setelah mereka pulang. Namun upaya pemberian beasiswa itu merupakan langkah yang maju pada waktu itu.

Guru-guru yang terkenal dari al-Irsyad, selain Syekh Ahmad Surkati, juga terdapat Syekh Ahmad al-Aqib al-Anshari lulusan al-Azhar Kairo, Abdul Fadlil al-Anshari lulusan College Gordon Sudan, Muhammad al-Hasyimi lulusan al-Zaitun Tunisia, Muhammad al-Attas lulusan Kuliah Teknik Turki, Syaikh Abdurrahim lulusan hakim agama Kairo dan lain-lain.

Di Majalengka, Jawa Barat, berdiri organisasi Perserikatan Ulama, didirikan oleh K.H.A. Halim pada 1911. Halim lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887, orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama. Halim pergi ke Mekkah untuk memperdalam pelajarannya pada usia 22 tahun.

Kegiatan yang paling menonjol di bidang adalah mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Santi Asrama pada tahun 1932, di samping sekolah-sekolah seperti yang didirikan oleh al-Irsyad.

Didirikannya Santi Asrama oleh K.H.A. Halim ini, dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk memberikan bekal keterampilan kepada murid-muridnya. Dengan begitu, di samping kurikulum biasa, seperti terdapat pada sekolah-sekolah lain dari Perserikatan Ulama – pelajaran umum dan agama – pelajar-pelajar Santi Asrama dilatih pertanian, pekerjaan tangan (kayu dan besi), menenun dan mengolah berbagai bahan, seperti membuat sabun. Pendidikan di Santi Asrama ini terdiri dari 3 bagian: tingkat permulaan, dasar dan lanjutan. Murid-murid Santi Asrama ini harus tinggal di asrama dengan disiplin yang ketat.

Yang menarik dari K.H.A. Halim yaitu bahwa ide-ide pembaharuannya tidak merubah sikapnya dari keterikatan terhadap madzhab Syafi'i. Dia mendapatkan pendidikannya di Mekkah, membaca kitab-kitab Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-

Afghani, tetapi dia mengaku bukan itu yang mengilhami gagasan-gagasan pembaharuannya. Dia lebih melihat lembaga pendidikan di *Bab al-salam* dekat Mekkah dan sebuah lagi di Jeddah, yang telah menghapuskan sistem halaqah dan menggunakan sistem klasikal dengan bangku dan meja, sebagai yang mengilhami gagasan pembaharuannya di bidang pendidikan.

Di Banten pada tahun 1916 berdiri Madrasah Mathla'ul Anwar di Menes, Pandeglang. Pada saat yang sama, pondok pesantren di bawah asuhan K.H. Syam'un juga berdiri. Sembilan tahun kemudian, K.H. Syam'un mentransformasikan pondok pesantren menjadi madrasah yang menggunakan sistem pendidikan modern dan mengadopsi ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum pendidikannya. Melihat kenyataan ini, Lothrop Stoddard mengatakan bahwa dua lembaga pendidikan Islam ini memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kemajuan umat Islam Banten di kemudian hari. Keduanya dikatakan sebagai gerakan salaf yang membakar kekolotan-kekolotan zaman pada saat itu (Stoddard: 1966).

Di Sumatera Barat pada tahun 1928, berdiri PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dipelopori oleh Sulaiman ar-Rasuli, pemilik surau di Candung. Pada tahun 1942, sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 murid.

Akan tetapi, kendati telah menggunakan sistem klasikal, madrasah PERTI ini isi pendidikan belum dilakukan perubahan. Sampai pada tahun 1947 sekolah PERTI yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. Organisasi ini juga bergerak di luar bidang pendidikan, khususnya membangun masjid dan sejumlah tempat yatim piatu.

Di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan, atas prakarsa guru-guru dan pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli pada tahun 1930 didirikanlah organisasi al-Jami'ah Washliyah. Organisasi ini juga banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Tiga orang yang merupakan pendorong paling penting dalam perkumpulan ini, yaitu: Abdurrahman Syihab, Udin Syamsuddin dan Arsyad Thalib Lubis.

Pada permulaan tahun 1933, dibentuk sebuah komisi yang bertugas mengadakan inspeksi ke semua madrasah Jami'atul Washliyah setiap enam bulan sekali, dan pada tahun 1934 disusun peraturan umum untuk inspeksi madrasah.

Organisasi ini mendirikan dua sistem pendidikan. Di satu pihak mendirikan sekolah-sekolah yang memakai sistem pendidikan gubernemen, di samping mengajarkan mata pelajaran umum juga mengajarkan mata pelajaran agama. Selain itu, didirikan juga madrasah yang khusus menitikberatkan mata pelajaran agama.

Organisasi berikutnya yang juga besar peranannya dalam bidang pendidikan Islam di Sumatera Utara ialah al-Ittihadiyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1932, mengasuh sejumlah sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah pertama dan atas, banyak tersebar di Kotamadya Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Nahdatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriyah oleh kalangan ulama penganut madzhab yang seringkali menyebut dirinya sebagai golongan ahlussunnah Waljama'ah yang dipelopori oleh K.H. Hasrim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Berdirinya gerakan NU tersebut adalah sebagai reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam Indonesia, dan berusaha mempertahankan salah satu dari empat madzhab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan dalam hal i'tiqad, NU berpegang pada aliran Ahlussunnah Waljama'ah. Dalam konteks ini, NU memahami hakikat Ahlussunnah Waljama'ah sebagai ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya (Chairul Anam: 1985, p. 135). Organisasi sosial keagamaan ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya. Pendidikan yang diselenggarakannya adalah pesantren, madrasah dan sekolah.

Pesantren yang pertama kali berada di bawah naungan NU adalah pesantren Tebuireng yang didirikan pada tahun 1899, sebab pemilik dan pengasuh pesantren ini adalah salah seorang pendiri NU tersebut, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1919, di lingkungan pesantren Tebuireng dibuka Madrasah Salafiyah atau Madrasah Diniyah dengan sistem klasikal, walaupun materi pelajarannya masih 100% pengetahuan agama. K.H. Mohammad Ilyas, salah seorang keponakan K.H. Hasyim Asy'ari, berusaha keras untuk memasukkan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah di samping memasukkan surat kabar dan majalah untuk dibaca oleh para santri. Dia juga mengintensifkan pengajaran bahasa Arab dengan sasaran mampu membaca, berbicara dan menulis.

Kemudian, organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan beserta teman-temannya. Organisasi ini bermaksud menyebarkan pengajaran kanjeng nabi Muhammad kepada penduduk bumiputra dan memajukan hal agama Islam kepada anggotanya. Untuk kepentingan itu, maka didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan.

Tujuan pendidikan Muhammadiyah ini adalah terwujudnya manusia muslim, berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Ada dua jenis sekolah yang diasuh Muhammadiyah. *Pertama*, sekolah-sekolah umum berbasis mata pelajaran umum dengan menambah mata pelajaran agama (*met de Qur'an*) sebagai ciri khas yang wajib diberikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. *Kedua*, sekolah-sekolah agama yang berbasis ilmu-ilmu keagamaan, yang kemudian digolongkan dalam kelompok madrasah. Madrasah Muhammadiyah ini dibagi kepada tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas.

Sekolah yang berbasis mata pelajaran umum, misalnya Taman Kanak-kanak (Bustanul Athfal), Vervolgschool 2 tahun, Schakelschool 4 tahun, HIS 7 tahun, Mulo 3 tahun, AMS 3 tahun dan HIK 3 tahun. Sedangkan sekolah-sekolah yang berbasis ilmu-ilmu keagamaan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun, tsanawiyah 3 tahun, Muallimin/Muallimat 5 tahun dan Kulliyatul Muballighin (SPG Islam) 5 tahun.

Pada tahun 1925, organisasi ini telah mempunyai 29 cabang dengan beranggotakan 4000 orang. Sedangkan kegiatan-kegiatannya dalam pendidikan meliputi delapan *Hollands Inlansche School*, sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah *Schakelschool*, 14 madrasah, yang seluruhnya memerlukan 119 guru dengan 4000 murid. Pada tahun 1938 terdapat 852 cabang-cabang serta 898 kelompok (yang belum berstatus cabang), seluruhnya dengan 250.000 anggota. Ia pun memiliki 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 sekolah (Zuhairini: 1992).

Di Bandung, Jawa Barat, juga didirikan Persatuan Islam (Persis) pada permulaan tahun 1920. Tokoh paling masyhur dari organisasi ini adalah Ahmad Hassan yang lahir di Singapura pada tahun 1887, berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Tokoh lainnya adalah Muhammad Natsir, lahir di Alahan Panjang (Sumatera Barat) pada tanggal 17 Juli 1908. Atas upaya Natsir didirikan sebuah lembaga pendidikan yang mengasuh Sekolah Taman Kanak-kanak, HIS, MULO dan sebuah Sekolah Guru. Di samping sekolah-sekolah tersebut, Persis juga mendirikan sebuah pesantren di Bandung pada bulan Maret 1936. Kemudian pesantren ini dipindahkan ke Bangil (Jawa Timur), ketika Hassan pindah ke sana dengan membawa 25 siswa dari 40 siswa dari Bandung.

Pembaharuan-pembaharuan pendidikan Islam pada awal-awal abad ke-20 juga terlihat di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Tetapi secara umum memiliki pola dan format yang tidak jauh berbeda, baik di luar Jawa maupun di Jawa. Dalam konteks ini, Azyumardi Azra mengatakan bahwa pembaharuan pendidikan Islam tersebut telah memunculkan dua

bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam, yaitu: *Pertama*, sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam; *kedua*, madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda (Azra: 1999). Contoh dari bentuk pertama misalnya, Sekolah Adabiyah dan sekolah-sekolah umum (tetapi *met de Qur'an*); sedangkan contoh yang kedua adalah Sekolah Zainuddin Labay el-Yunusi, Sumatera Thawalib, atau madrasah-madrasah al-Jami'at al-Khairiyah dan kemudian juga madrasah al-Irsyad.

#### **4.3 Implikasi Kebijakan Politik Pendidikan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia**

Kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda menimbulkan implikasi terhadap eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif. Sebelum abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti langgar, masjid, surau, dayah/meunasah dan pesantren, merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengisi catatan lembaran-lembaran sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, mendapatkan tantangannya dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh kolonial Belanda yang berbeda yang kemudian dikenal dengan nama sekolah.

Pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai yang tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang (murid) Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kekuasaan kolonial. Sebab itu, walaupun sistem pendidikan yang dikembangkan sedikit banyak telah memberi peluang bagi anak-anak bumiputra – tentu saja sebagai hasil interaksi antara penguasa kolonial dan penduduk setempat – sekolah-sekolah yang didirikan terutama berfungsi untuk tujuan memenuhi kepentingan kolonial. Yang terpenting dalam hubungan ini ialah untuk mengisi kekurangan tenaga pegawai dalam birokrasi kolonial di tingkat bawah (lokal), atau menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan swasta yang erat hubungannya dengan pemerintah (Mestika Zed: 1991).

Implikasi lebih jauh dari kebijakan seperti itu, telah melahirkan tambahan kondisi sosial-budaya baru yang juga harus diperhitungkan. Kebijakan menjalankan kolonial secara tidak langsung (dengan menggunakan kelas elit tradisional setempat sebagai perantara) telah mengakibatkan susunan kemasyarakatan yang semakin diskriminatif. Pembagian kelas atas-

bawah tradisional (antara lain sebagai sisa sistem kasta) semakin dipertajam dengan adanya kesenjangan yang semakin lebar oleh introduksi pendidikan dan keahlian modern kepada kelas atas. Wilayah Nusantara dibagi menjadi beberapa kawasan, dan setiap kawasan itu ditetapkan kerucut sosial tertentu setempat. Mereka ini diberi prioritas dalam memperoleh pendidikan modern (Barat, Belanda), dan disiapkan untuk mengisi susunan piramidal pemerintahan kolonial (Madjid: 2000).

Terciptanya pemisahan sosial dan kesenjangan budaya antara minoritas kecil pemuda Indonesia dengan latar belakang keluarga papan atas dan sebagian besar pemuda Indonesia dengan latar belakang keluarga biasa. Pembagian ini tercipta oleh penerapan “dualisme yang bertentangan antara pendidikan bagi orang Belanda dan pendidikan bagi orang Indonesia.” (S. Nasution: 1987). Di satu sisi anak-anak dari keluarga berpendidikan Eropa dan pemuda pribumi dari keluarga papan atas mendapat akses ke sekolah modern model Eropa. Para pemuda priyayi ini diperkenalkan kepada pendidikan, cara berpikir, dan gaya hidup Barat, sehingga menjadi terasing dari temannya, bangsanya dan budayanya. Dalam hal ini Bradjanegara (1956) mengatakan:

Susunan pendidikan dan pengadjaran, yang diuraikan di atas, mengandung tendens atau maksud, untuk memetjah belah masyarakat pemuda kita. Pemuda-pemuda lapisan atas dididik dan diberi pengadjaran secara barat, didekatkan dengan djiwa Barat, mulai umur 5 tahun sampai umur 25 tahun. Dapat dimengerti dengan mudah, bahwa kaum terpeladjar dari masyarakat kita berdjawa kebaratan. Tjara berpikir mereka juga secara Barat, dan kehidupan sehari-hari djuga secara barat, dalam ujud kemauannya. Dengan sistim ini, lapisan atas ini tidak mengenal lagi kedjiwaan bangsanja, dan pula tidak mengenal kebudjajaan bangsanya. Kehidupan mereka terpisah dari masyarakat bangsanya.

Namun di sisi lain, perkembangan sekolah yang semakin merakyat dalam batas yang cukup jauh telah merangsang kalangan Islam untuk memberikan respons. Dalam hal ini mereka memikirkan bahwa diskriminasi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya masih sangat tampak dalam politik dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebanyakan rakyat Indonesia bagaimana pun masih akan tetap bodoh karena tingkat pendidikan yang diperkenankan bagi mereka hanya terbatas pada sekolah rendah. Dari sudut ini, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi asas Islam. Namun di sisi lain, pendidikan Islam sudah saatnya untuk menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal kelembagaan, struktur materi, maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi sekolah ala Belanda.

Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding dengan sekolah ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda bagi hampir semua organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Jami'at Khair, Perserikatan Ulama, al-Washliyah dan organisasi Islam lainnya memiliki bagian atau seksi khusus dalam rangka pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah. Dengan corak yang masing-masing berbeda, madrasah-madrasah itu menandai satu perkembangan Islam yang tidak lagi terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu agama. Meskipun madrasah-madrasah dalam organisasi-organisasi Islam itu dijadikan wahana percetakan kader-kader yang mendukung masing-masing organisasi, tetapi perkembangannya cukup memberi warna dan corak keberagaman, wawasan ilmu pengetahuan, dan keterampilan umat Islam Indonesia yang lebih progresif. Dengan mendirikan madrasah, langkah yang dilakukan oleh umat Islam dalam meresponi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda agaknya tidaklah keliru. Mereka memperbaharui pendidikan Islam yang di satu sisi tidak terlalu tertinggal, dan sisi lain tetap mempertahankan ciri-ciri keislamannya.

Dengan demikian, implikasi positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam salah satunya yaitu munculnya lembaga pendidikan Islam baru dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia yang bernama madrasah. Pada titik ini, dapatlah dikatakan bahwa madrasah merupakan penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini berdasarkan alasan bahwa, struktur dan mekanisme yang terdapat di madrasah ini nyaris sama, yang sekilas dapat diduga bahwa madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah – yang hanya diberi muatan dan corak keislaman.

Madrasah dalam perkembangannya memiliki struktur dan penjenjangan baik secara vertikal seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah maupun secara horizontal dalam bentuk sekolah-sekolah kejuruan seperti: PGA, PHIN, Mua'allimin, Kulliyatul Muballighin, dan lain-lain. Dengan demikian, madrasah bukanlah lembaga pada kejuruan agama, melainkan bentuk sekolah umum yang menjadi jenjang persekolahan bagi peserta didik yang hendak melanjutkan sekolahnya dengan disertai keinginan untuk mendalami agama lebih banyak.

Akan tetapi, kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintahan kafir”, semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Hal ini kemudian membawa akibat negatif terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut, dengan ditandai oleh

sikap semacam “eskapisme dan pengunduran diri” dari sebagian umat Islam dari daerah urban ke pedalaman. Karena gerakan pengunduran diri ini dimulai oleh ulama, dampaknya semakin efektif dan luas. Di daerah pedalaman, mereka mendirikan kubu-kubu pendidikan baru. Di sinilah mereka melancarkan perlawanan kultural keagamaan terhadap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang asing. Barangkali dengan latar belakang inilah, sejak sekitar terakhir abad ke-19, kaum ulama bersama para santrinya memusatkan kegiatan belajar tradisionalnya pada berbagai pesantren. Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah kolonial ini, terlihat pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggiran atau bahkan di luar keduanya. Padahal pada perkembangan awal-awal sistem pondok pesantren ini, umumnya berlokasi di sekitar kawasan kraton dan berada dalam kewenangan sultan (Jalaluddin: 2007).

Dalam lembaga-lembaga pendidikan itu terasa sekali semangat pengucilan diri dari sistem kolonial pada umumnya. Secara simbolik semangat itu dicerminkan dalam sikap para ulama yang mengharamkan apa saja yang datang dari Belanda, sejak dari yang cukup prinsipil seperti ilmu pengetahuan modern (dan huruf Latin) sampai hal-hal yang sederhana seperti celana dan dasi (Madjid: 2000).

Sebagai akibat pengalaman pahit yang dialami para ulama dengan aparat-aparat kolonial Belanda di masa lampau, menurut Abdurrahman Wahid (2001) mengandung dua macam sosiologis, yaitu: sifat tertutup pesantren dan berkembangnya tingkat solidaritas tinggi di kalangan berbagai pesantren, terutama yang di bawah pengaruh ulama tradisional.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda telah menimbulkan implikasi bagi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam. Implikasi positif dari kebijakan tersebut adalah bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern yakni madrasah di Indonesia. Sedangkan implikasi negatif dari kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda itu adalah munculnya sikap resistensi dan isolatif pesantren terhadap dunia luar yang mengakibatkan ia semakin meneguhkan konservatisme yang diidap oleh warga pesantren itu sendiri. Sikap ini pada gilirannya kemudian akan melahirkan alumni-alumni pesantren yang gagap dengan realitas sekitarnya yang jauh dari selama ini dibayangkannya.

Pada tingkat kurikulum, implikasi kebijakan pendidikan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam juga terlihat yaitu telah terjadinya kombinasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Sebelum hembusan angin pembaharuan pendidikan Islam menerpa lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surau dan

rangkang, pada awal abad ke-20, pendidikan hanya berpusat pada pengetahuan-pengetahuan keagamaan belaka. Baru setelah lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut mentransformasikan diri ke bentuk lembaga pendidikan baru, muatan pengajaran dikombinasikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Dimasukkannya pengetahuan-pengetahuan umum di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, dimaksudkan untuk mengimbangi sistem pendidikan sekuler kolonial Belanda yang melulu memusatkan diri pada ilmu-ilmu pengetahuan umum, kebalikan dari sistem pendidikan Islam tradisional di atas. Upaya-upaya ini dilalui dengan jalan mengadopsi secara langsung susunan-susunan kurikulum dan mata-mata pelajaran yang disajikan dalam sistem pendidikan kolonial Belanda.

Dengan demikian, implikasi kebijakan pendidikan kolonial Belanda ternyata juga ikut memengaruhi perkembangan susunan-susunan kurikulum dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam itu. Kurikulum ini juga telah diatur dan direncanakan sehingga lebih sistematis. Di samping itu, pandangan terhadap ilmu-ilmu umum juga telah mendapatkan perhatian dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini mungkin berdasarkan harapan bahwa anak-anak didik kelak dapat menyesuaikan diri dalam alam modern sembari tidak tercerabut dari akar keislamannya. Dengan cara ini, diharapkan kelak akan lahir pribadi-pribadi muslim yang utuh, yaitu semacam kombinasi antara seorang alim dan seorang intelektual; atau yang dalam istilah Hamka adalah *ulama intelek*, yaitu mereka yang ahli di bidang agama dan memenuhi kriteria intelek menurut ukuran sekolah (Steenbrink: 1994, p. 228).

Metode pengajaran yang sebelumnya menggunakan sistem hafalan, bandongan/halaqah dan sorogan/individual, diganti dengan metode pengajaran yang menekankan pada pemahaman siswa dan diterapkannya sistem klasikal atau berkelas-kelas.

Demikianlah sistem klasikal mulai diterapkan, bangku, meja, papan tulis mulai digunakan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Sebagai contoh, surau Jembatan Besi di Minangkabau diubah menjadi Madrasah Thawalib, yang lambat laun disempurnakan dengan pemakaian bangku, meja dan kurikulum yang lebih diperbaiki dan ada uang sekolah bagi anak-anak.

Pembagian kelas juga mulai diadakan. Misalnya di Madrasah Thawalib tersebut, jenjang kelas dibagi menjadi kelas rendah, menengah dan tinggi, yang dalam perkembangannya pembagian jenjang kelas ini diubah yakni untuk kelas rendah dibagi menjadi 4 jenjang masing-masing satu tahun, sedang untuk kelas menengah dan tinggi dijadikan kelas 5, kelas 6 dan kelas 7.

Demikianlah sistem pendidikan formal, sekolah dan madrasah, mulai tersebar di mana-mana, bahkan di kalangan pondok pesantren sudah diterapkan pula sistem sekolah atau madrasah ini, di samping sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren yang sudah ada. Implikasi lebih jauh lagi, dalam sejarahnya guru agama hanya didominasi oleh para kyai, tetapi perkembangan berikutnya peran ini terbagi dengan guru agama modern. Kyai dapat memainkan banyak peran pada sebuah masyarakat yang masih tradisional. Seorang kyai karena kharismanya diyakini oleh masyarakat dapat memancarkan *barokah* kepada umat yang dipimpinnya, yaitu karena dianggap memiliki *karomah* (kelebihan yang bersifat supranatural) dari Allah. Kyai dapat memerankan dirinya sebagai *tabib* di kalangan masyarakat santri manakala belum ada ahli pengobatan yang lain, seperti dokter atau mantra kesehatan.

Steenbrink mengidentifikasi beberapa perubahan dari guru agama tradisional dan modern. Pada guru agama modern terjadi perubahan sikap yang berhubungan dengan kesediaan dalam meluangkan waktunya. Kalau mereka mengajar di tempat lain adalah disebabkan gaji guru yang agak rendah, sehingga jabatan rangkap syarat mutlak untuk mencapai gaji minimum. Mengenai pengamalan doa, puasa sunnat dan membaca al-Qur'an masih tetap dihargai khususnya di madrasah/sekolah yang berada di lingkungan pesantren. Tetapi di luar itu contoh kehidupan sehari-hari para guru tidak begitu penting untuk pendidikan para muridnya, karena pergaulan antara guru dengan murid tidak begitu akrab bahkan cenderung bersifat kontraktual. Pribadi yang utuh seperti guru agama tradisional tidak terlalu dipentingkan lagi, bahkan syarat-syarat kesalehan adalah kelebihan kalau dituntut ada pada guru agama modern. Yang dipentingkan adalah intelektualitas dan syarat-syarat yang berhubungan dengan pengajaran dan apa yang diperbuat oleh guru agama modern di luar kelas adalah kurang relevan untuk pengajaran dan pendidikan.

Dalam hal orientasi, guru agama tradisional lebih menekankan pada pengabdian secara ikhlas seperti ditunjukkan dalam sikapnya yang total dalam kedudukannya sebagai kyai. Guru agama modern pengabdian secara ikhlas tetap dipentingkan, karena tuntutan-tuntutan hidup yang tidak dapat diabaikan begitu saja menyebabkan mereka menuntut upahnya secara terang-terangan. Bahkan guru modern bisa menolak tugas-tugas di luar tanggung jawabnya dalam pengajaran. Kalau pun tugas itu diterima konsekuensinya harus sesuai dengan beban yang diberikan. Oleh karena itu, dalam hal orientasi dan kedudukannya dalam pengajaran guru agama modern sama dengan guru bidang-bidang studi yang lain.

## 5. PENUTUP

Kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda secara langsung atau pun tidak telah melahirkan apa yang disebut sebagai dualisme pendidikan. Belanda mendirikan lembaga-lembaga dengan sistem persekolahan yang relatif modern dan maju. Di sisi lain ia membiarkan – untuk tidak mengatakan memperlakukan secara diskriminatif, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang sudah ada. Sistem persekolahan Belanda disokong sepenuhnya oleh pemerintah sedangkan pendidikan Islam berjalan dengan hanya mengandalkan kekuatan tekad para pendirinya. Sebagai akibat lebih jauh dari perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia ini, kini masing-masing ditangani oleh dua kementerian yang berbeda. Pendidikan umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sementara Pendidikan Islam di bawah kewenangan Kementerian Agama. Perlu *political will* besar dan strategis dari pemerintah Republik Indonesia agar dualisme pendidikan warisan kolonial ini dapat berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, Mona (1999). *Pendidikan Islam dalam Pergeseran Orientasi: Suatu Kasus Alumni al-Azhar*. Jakarta: LP3ES.
- Anam, Chairul (1985). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Penerbitan Jatayu.
- Anis, Ibrahim dkk. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Asrahah, Hanun (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Benda, Harry J. (1989). “Christiaan Snouck Hurgronje dan Landasan Kebijakan Belanda Terhadap Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim dkk., *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*. Alih bahasa A. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES.
- Bradjanegara, Sutedjo (1956) *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: t.t.t.
- Daulay, Haidar Putra (2001). *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Daya, Burhanuddin (1990). *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1986) *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djumhur, I. dan Danasuparta (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Gibb, H.A.R. dan H. Kramers (1981). *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill.
- Gunawan, Ary H. (1995). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imron, Ali (1996). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin (2007). "Kata Pengantar", dalam M. Sirozi, *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (1990). *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Khalid, Idham (1997). *Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia Awal Abad XX: (Seri Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia)*. Bandarlampung: IAIN Raden Intan.
- Maarif, Ahmad Syafi'I (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish (2000.) *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. cet. ke-4, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Muhaimin dan Abdul Majid (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhaimin (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhtar, Maksum (2001). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly (1998). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, S. (1987). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. cet. ke-2, Bandung: Jemmars.
- Nata, Abuddin (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, Samsul (2005). *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Noer, Deliar (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. cet. ke-8, Jakarta: LP3ES.

- Prijono (1945). "Riwayat Penjajahan Barat dan Perlawanan Umat Islam", dalam *Beberapa Peninggalan dari Sejarah Perjuangan Islam*. Jakarta: t.p.
- Shadily, Hassan (1982). *Ensiklopedi Indonesia*, Jil. 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Shihab, Alwi (1998). *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Steenbrink, Karel A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. cet. ke-2, Jakarta: LP3ES.
- Stoddard, Lothrop (1966). *Dunia Baru Islam (The New World of Islam)*. Jakarta: t.t.p.
- Sumardi, Mulyanto (1978). *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1975)*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Suminto, Husnul Aqib (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta:LP3ES.
- Supandi dan Ahmad Sanusi (1988). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti P2LPTK.
- Supartono, A. dan L Rahman (2001). "Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi". *Kompas*, 6 Juli.
- Tarmi (2001). "Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia", dalam Abudin Nata (Ed.). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Penyusun (1983). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_ (1989). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jil. 3, Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- \_\_\_\_\_ (1989) *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jil. 7, Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Truna, Dody S. dan Ismatu Ropi (Ed.) (2002). *Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan)*. Jakarta: Ciputat Press.
- Wahid, Abdurrahman (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esei-esei Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Walidain, Warul (1988). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial*. Alih bahasa A.F. Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Whalley, Lucy A. (1998). "Meletakkan Islam ke dalam Praktik: Perkembangan Islam dalam Perspektif Gender di Minangkabau", dalam Mark R. Woodward (Ed.), *Jalan Baru*

*Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi, Bandung: Mizan.

Yunus, Mahmud (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Zed, Mestika (1991). "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perspektif Sejarah". *Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, No. 1, Jakarta: Gramedia,

Zuhairini (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.